

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang  
©2025

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan “Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2026”, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renja ini dapat terwujud atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Anom Widiyantoro, S.E., M.M selaku Bupati Pemalang;
2. Bapak Nurkholes, S.H., M.Si selaku Wakil Bupati Pemalang;
3. Bapak Heriyanto, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Segenap keluarga besar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari Renja ini belumah sempurna. Oleh karena itu, mohon saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikan Renja ini di masa mendatang.

Pemalang, 15 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN .....	vii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 .....	  II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKD Kabupaten Pemalang .....	 II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	II-16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	II-19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-34
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat .....	II-46
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN PEMALANG .....	 III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	III-3
A. Tujuan .....	III-3
B. Sasaran .....	III-3
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III-5
3.4. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	III-14
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PEMALANG .....	  IV-1
 BAB V PENUTUP .....	 V-1
5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian .....	V-1
5.2. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan .....	V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	V-1
 LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2024 .....	II-3
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2025 .....	II-8
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang (Renstra 2021-2026) .....	II-16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang (Renstra 2025-2029) .....	II-19
Tabel 2.5	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2024 .....	II-21
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 .....	II-22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 .....	II-23
Tabel 2.8	Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	II-23
Tabel 2.9	Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang .....	II-31
Tabel 2.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 .....	II-35
Tabel 2.11	Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 .....	II-46
Tabel 3.1	Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 .....	III-4
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ...	III-4
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....	III-6
Tabel 3.4	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis dan Operasional BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 .....	III-15
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan .....	IV-5
Tabel 4.2	Rencana Aksi Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 .....	IV-13



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 .....	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	I-3

## **DAFTAR LAMPIRAN**

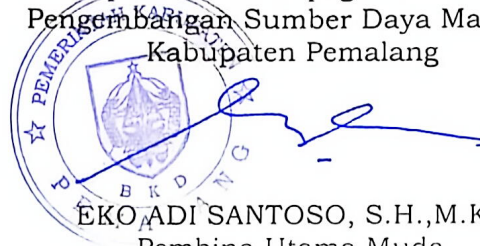
1. SK Tim Kerja Penyusunan Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
2. SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
3. Forum Perangkat Daerah.
4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Renja.
5. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Pematang.

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, 15 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

# **“Y. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026”**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

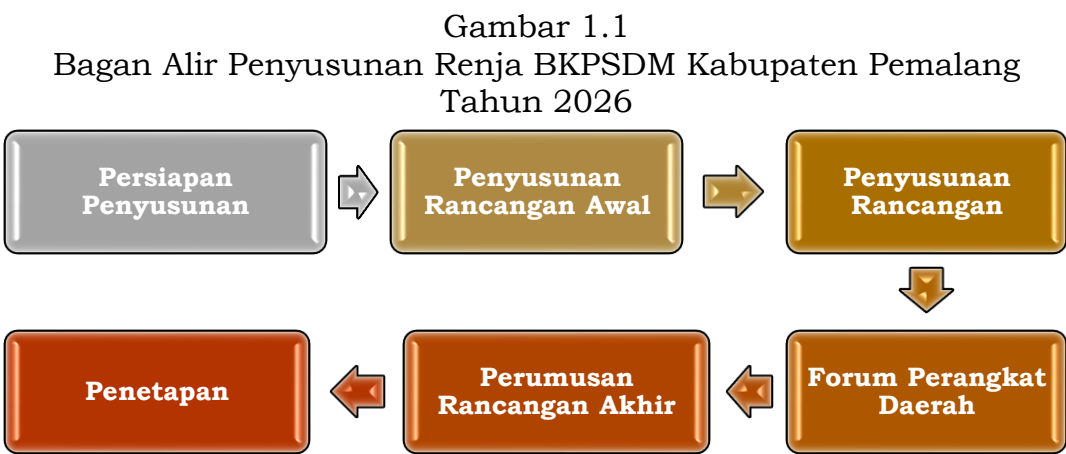
Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

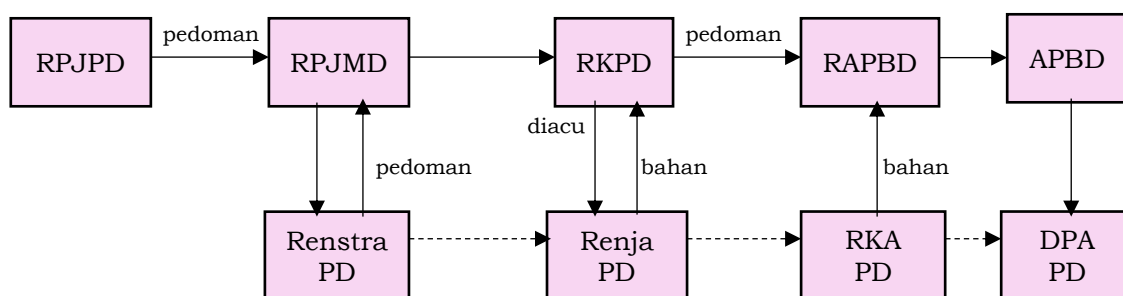
1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Tahun 2024, pengendalian kegiatan Tahun 2024, dan RKPD Tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Bidang dan UPT di BKPSDM Kabupaten Pemalang
  - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
  - Sinkronisasi oleh Tim Kerja Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Melaksanakan FGD dengan mengundang : OPD di lingkungan Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan yang terkait yang dilaksanakan bersamaan dengan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
5. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Kerja Penyusunn Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
  - Diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang
6. Penetapan
  - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);



20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di BKPSDM Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024**

#### **2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbaikan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang di tahun 2024 adalah:

A.Tujuan :

Meningkatnya profesionalitas ASN

B.Sasaran :

- 1.Meningkatnya kompetensi ASN
- 2.Meningkatnya kinerja ASN
- 3.Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN
- 4.Meningkatnya disiplin ASN
- 5.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di BKPSDM Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 dan estimasi Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

##### Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang sebesar Rp14.948.977.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp13.338.166.118,00 atau sebesar 89,22%.

##### Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan BKPSDM Kabupaten Pemalang sebesar Rp13.458.659.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Sampai dengan Juni, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp4.456.987.612,00 atau sebesar 33,12%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

- a.Dari 7 indikator kinerja utama yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu persentase tingkat kedisiplinan ASN, disebabkan di tahun 2024 sejumlah 12 ASN mendapat hukuman disiplin.
- b.Dari 9 indikator program yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu persentase nilai kinerja

aparatur yang dievaluasi, disebabkan di tahun 2024 sejumlah 271 pegawai tidak melaporkan kinerjanya melalui e-Kinerja BKN.

c. Dari 17 indikator kegiatan yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu jumlah dokumen administrasi kepegawaian bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur, disebabkan di tahun 2024 tidak ada pegawai yang mendapat tanda jasa satya lancana.

d. Dari 43 indikator sub kegiatan yang ada, terdapat 2 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :

1) Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi disebabkan di tahun 2024 tidak terdapat lembaga profesi ASN yang difasilitasi.

2) Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa, disebabkan di tahun 2024 tidak ada pegawai yang mendapat tanda jasa satya lancana.

Tabel 2.1

## Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan sebesar 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 9 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan peserta sebanyak 45 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah sebanyak 38 paket sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 24 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebanyak 13 unit sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 13 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 3 jasa selama 12 bulan sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebanyak 147 unit sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 36 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar sebanyak 1 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 108 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian) tepat waktu sebesar 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN sebanyak 668 dokumen melebihi target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan melebihi target</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 2 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian sebanyak 664 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya kualitas sistem informasi layanan kepegawaian yang terintegrasi sebesar 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan sistem kepegawaian sebanyak 10 kegiatan sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya mutasi dan promosi ASN sesuai kinerjanya sebanyak 83,62% melebihi target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 11 kegiatan sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah sebanyak 6 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN sebanyak 5 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) sebanyak 6 kegiatan sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 6 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya pengembangan kompetensi ASN sebanyak 84,31% melebihi target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN sebanyak 9137 orang melebihi target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan melebihi target</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN sebanyak 9137 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya assessment center sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat sebanyak 9137 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pembinaan jabatan fungsional ASN	Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional ASN sebanyak 152 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya kualitas pendidikan ASN sesuai jabatannya sebanyak 2,56% melebihi target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya kegiatan peningkatan kualifikasi pendidikan ASN sebanyak 149 orang melebihi target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan melebihi target</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebanyak 149 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan</b>



<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) sebanyak 50 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Meningkatnya karir ASN jabatan fungsional sebanyak 50 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja ASN sebanyak 97,50% tidak mencapai target</li> <li>•Penyebab : di tahun 2024 sejumlah 271 pegawai tidak melaporkan kinerjanya melalui e-Kinerja BKN</li> </ul>	<b>Target Renstra tidak tercapai</b>
<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja ASN sebanyak 4 dokumen sesuai target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan sesuai target</b>
Sub Kegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Tersusunnya kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 1 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (penghargaan, tanda jasa, ijin perceraian) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (penghargaan, tanda jasa, ijin perceraian) sebanyak 2329 orang tidak mencapai target</b>	<b>Kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN sebanyak 2306 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Terlaksananya pelayanan proses izin perceraian pegawai sebanyak 23 kegiatan melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tercapainya kedisiplinan ASN sebanyak 99,89% melebihi target</li> <li>•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</li> </ul>	<b>Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan</b>
<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN sebanyak 12 kegiatan melebihi target</b>	<b>Kegiatan terselesaikan melebihi target</b>
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN berupa pembinaan kepada 39 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 12 kegiatan melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Evaluasi disiplin ASN	Terlaksananya evaluasi disiplin ASN sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

*Sumber : LkjIP BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024*



Berdasar tabel 2.1, terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan:

- 1.Komitmen pemimpin di BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
- 2.SDM dan sarana prasarana di BKPSDM Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

- 1.Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
- 2.Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika embaga nan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
- 3.Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
- 4.Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
- 5.Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait.

Masih terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga kedepan harus lebih cermat dalam menentukan target dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang  
dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian perencanaan dan keuangan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	41	16	9	9	100	16	41	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	11	4	2	2	100	3	9	81,82
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	3	6	120
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	3	6	120
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	2	5	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	2	2	2	100	3	7	140

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>144</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>76</b>	<b>52,78</b>
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (dokumen)	4	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>80</b>
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan (orang)	3	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (orang)	4	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	350	135	45	45	100	385	565	161,43
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	280	0	0	0	100	0	0	0
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah (paket)</b>	<b>360</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>136</b>	<b>37,78</b>
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan (paket)	60	24	24	24	100	12	60	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	60	24	2	2	100	2	28	46,67
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	60	24	4	4	100	4	32	53,33
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	60	24	4	4	100	4	32	53,33
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	20	0	0	0	100	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	16	0	0	0	0	4	4	25
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)</b>	<b>68</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>150</b>	<b>220.59</b>
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	8	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	10	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	15	24	13	13	100	113	150	1000
5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (unit)	25	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	10	0	0	0	100	0	0	0
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)</b>	<b>240</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>144</b>	<b>60</b>
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit/tahun)</b>	<b>595</b>	<b>380</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>613</b>	<b>103,02</b>
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit/tahun)	200	71	0	0	100	9	80	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit/tahun)	200	73	36	36	100	27	136	68
5.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit/tahun)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit/tahun)	100	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit/tahun)	75	30	108	108	100	47	185	246,67
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit/tahun)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit/tahun)	10	4	2	2	100	2	8	80
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)	4	20,57	3,80	84,31	2.218	12,23	12,23	305,75
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)	2	1,19	1,80	2,56	142,22	3,65	3,65	182,5
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)	100	100	100	97,50	97,50	100	100	100
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)	2	21,65	1,80	83,62	4.645	7,22	7,22	361
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	95	100	100	100	100	100	100
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)	100	80	100	100	100	100	100	100
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN (%)	90	98,65	80	99,89	124,86	85	85	94,44
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) (dokumen)	2.040	428	616	668	108,44	517	1.613	79,07
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian (dokumen)	15	3	10	10	100	5	18	120
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN (dokumen)	5	0	1	0	0	0	1	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (dokumen)	5	1	1	2	200	2	5	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian (dokumen)	2.000	425	610	664	108,85	515	1.604	80,2
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN (dokumen)	5	0	1	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi ( lembaga/tahun)	10	0	1	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian (dokumen)	5	1	4	4	100	4	9	180
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian (dokumen)	5	1	4	4	100	1	6	120
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (laporan)	5	1	2	2	100	2	5	100
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (dokumen)	25	5	8	11	137,50	5	21	84
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) (dokumen)	10	2	6	6	100	6	14	140
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah (dokumen)	5	1	4	6	150	4	11	220
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN (dokumen)	10	2	6	6	100	6	14	140
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (dokumen)	20	4	4	5	125	1	10	50



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya (orang)	600	173	200	9137	4.568	1.408	10.718	1.786
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (orang)	750	122	75	149	198,67	125	396	52,8
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembangan karir jabatan fungsional) (dokumen)	15	3	3	50	1.666,7	604	657	4.380
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (orang)	600	173	200	9137	4.568	1408	10.718	1.786
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan (orang)	750	122	75	149	198,67	125	396	52,8
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat (dokumen)	15	1	15	9137	60.913	3	9.141	60.940
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN (orang)	75	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (dokumen)	20	0	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina (orang)	25	0	0	152	152	604	756	3.024
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir (orang)	20	0	40	50	125	0	50	250
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN (dokumen)	75	8	5	4	80	4	16	21,33
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai (orang)	3622	1010	2346	2329	99,28	2556	5895	162,75
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN (dokumen)	115	12	5	12	240	13	37	32,17
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	0	1	100	0	1	20
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	65	8	4	4	100	4	16	24,61
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	1	4	400	0	4	80
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan (orang)	3.000	947	2.306	2306	100	2477	5730	191
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa (orang)	500	50	20	0	0	59	109	21,8
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur (dokumen)	5	0	0	1	100	0	1	20
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (orang)	150	34	36	39	108,33	200	273	182
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (laporan)	100	12	4	12	300	13	37	37
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani (dokumen)	125	13	20	23	115	20	56	44,8
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN (laporan)	15	0	1	1	100	0	1	6,67

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang  
(Renstra 2021-2026)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Penting
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	V	-	65,10	65,34	65,59	78,28	78,30	78,32	
2	Persentase kompetensi ASN	%	-	V	-	57,80	58,10	58,40	68,00	68,10	68,20	
3	Persentase kinerja ASN	%	-	V	-	80,30	80,30	80,30	83,36	83,40	83,44	
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	-	V	-	51,60	52,10	52,60	84,46	84,50	84,54	
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	-	V	-	99,7	99,7	99,7	99,17	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	V	-	83,95	84,98	85,15	84,78	88,40	88,40	
7	Nilai SAKIP	Nilai	-	V	-	60,45	60,50	60,55	65,66	71,41	72,41	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	51,45	51,80	51,90	-	-	-	Inspekto rat tidak melaksn akan evaluasi
9	Persentase capaian perencanaan dan keuangan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	-	-	-	3,80	3,90	4,00	84,31	3,20	4,00	
12	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	-	-	-	1,80	1,90	2,00	2,56	3,48	2,00	
13	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	-	-	-	100	100	100	97,50	100	100	
14	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	-	-	-	1,80	1,90	2,00	83,62	8,08	2,00	
15	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	-	-	-	80	85	90	99,89	85	90	
18	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	125	130	135	44,89	45,29	45,69	

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Penting
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	8,00	9,00	10,00	13,67	14,17	14,67	
20	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	4,00	5,00	6,00	22,94	23,44	23,94	

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026  
LKjIP Kabupaten Pemalang Tahun 2024  
LKPJ Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 20 kinerja terdapat 16 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :
  - a.Indeks Profesionalitas ASN
  - b.Persentase kompetensi ASN
  - c.Persentase kinerja ASN
  - d.Persentase tingkat pendidikan ASN
  - e.Indeks Kepuasan Masyarakat
  - f.Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
  - g.Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
  - h.Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
  - i.Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
  - j.Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
  - k.Persentase layanan administrasi kepegawaian
  - l.Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan

m.Persentase tingkat kedisiplinan ASN

n.Nilai SAKIP

o.Persentase capaian perencanaan dan keuangan

p.Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.SDM yang berkompeten;

b.Sarana dan prasarana yang relatif memadai;

c.Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.

d.Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;

e.Komunikasi yang intens antar instansi.

2.Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :

a.Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.

b.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.

c.Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan *punishment* kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.

d.Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdapat perubahan kinerja pelayanan, berupa :

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang  
(Renstra 2025-2029)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	-	V	-	-	273,00	283,50	294,00	262,50	273,00	283,50	294,00	
2	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	-	V	-	-	88,67	88,92	89,17	88,42	88,67	88,92	89,17	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	V	-	-	78,30	78,32	78,34	78,28	78,30	78,32	78,34	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	V	-	-	84,98	85,18	85,38	84,78	84,98	85,18	85,38	
5	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	V	-	-	71,41	72,41	73,41	65,66	71,41	72,41	73,41	
6	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase terpenuhinya ASN	Persen	-	-	-	-	71,31	74,43	77,39	64,51	71,31	74,43	77,39	
9	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	-	-	-	-	99,18	99,31	99,58	99,06	99,18	99,31	99,58	
10	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	-	-	-	-	21,14	21,16	21,18	21,12	21,14	21,16	21,18	
11	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	-	-	-	-	18,69	19,19	20,69	17,19	18,69	19,19	20,69	
12	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	-	-	-	-	94,83	94,85	94,87	94,81	94,83	94,85	94,87	
13	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	-	-	-	-	89,65	90,15	90,65	89,15	89,65	90,15	90,65	
14	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	-	-	-	-	27,40	27,60	27,80	27,20	27,40	27,60	27,80	

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

### 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengembangan kompetensi teknis; serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Evaluasi penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari:

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Persentase kompetensi ASN
- c. Persentase kinerja ASN
- d. Persentase tingkat pendidikan ASN
- e. Persentase tingkat kedisiplinan ASN
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat
- g. Nilai SAKIP
- h. Indeks Reformasi Birokrasi
- i. Persentase capaian perencanaan dan keuangan
- j. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian
- k. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
- l. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
- m. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
- n. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
- o. Persentase layanan administrasi kepegawaian
- p. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
- q. Persentase tingkat kedisiplinan ASN

BKD Kabupaten Pemalang harus berupaya meningkatkan kapabilitas birokrasi agar mencapai nilai optimal, dengan meningkatkan profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang. Tingkat profesionalitas ASN dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 78,28 melebihi target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 65,10 dan target Perjanjian Kinerja sebesar 75,00 sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,38%.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2024 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih rendah. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Namun, di tahun 2024 IP ASN Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Perbandingan IP ASN



Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2024

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
3	2024	79,49	79,38	80,76	79,45	75,25	78,87	78,28	82,93
Rata-rata		69,02	65,28	63,99	62,10	56,88	63,46	65,15	66,28

Sumber: IP ASN BKN, 2022, 2023 dan 2024

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori “sedang”, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan.

Dimensi yang pertama yaitu Kompetensi yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 68% mencapai target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 57,58% dan target Perjanjian Kinerja sebesar 65,00% sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,61%. Namun, masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan masih kurangnya ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi atau sudah mengikuti namun bukti dukung tidak diupload di Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Untuk meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 84,31% ASN telah meningkat kompetensinya. Namun masih perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan perlu dilaksanakan sosialisasi upload bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas di Simpeg.

Dimensi kedua yaitu Kinerja yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 83,36% melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80,30% sehingga tingkat capaiannya sebesar 103,81%. Untuk meningkatkan kinerja ASN telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN melalui e-kinerja dengan capaian di tahun 2024 sebanyak 97,50% ASN telah mengisi e-kinerja dan telah dievaluasi kinerjanya. Selain mengevaluasi kinerja ASN dilaksanakan juga evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dengan capaian di tahun 2024 sebanyak 83,62% pejabat.

Dimensi ketiga yaitu Kualifikasi yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 84,46% melebihi target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 51,60% dan target Perjanjian Kinerja sebesar 80% sehingga tingkat capaiannya sebesar 105,56%. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN telah dilaksanakan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,56% ASN telah meningkat kualifikasi pendidikannya.

Dimensi keempat yaitu Kedisiplinan yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 99,17% tidak mencapai target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 99,7% dan target Penjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,17%. Indikator ini diukur dari tingkat kehadiran berdasarkan absensi,

sedangkan apabila diukur dari jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga mendapatkan hukuman disiplin, tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2024 sebesar 99,89%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pelayanan pengadaan, pemberhentian, kenaikan pangkat, sertifikasi fungsional, diklat, pengembangan karir, pemberian tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Capaian terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di tahun 2024 sebesar 100%, pelayanan administrasi kepegawaian ini telah memanfaatkan digitalisasi sehingga hasil yang dicapai lebih efisien. Selanjutnya, dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian telah digunakan sistem kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan dikembangkan setiap saat. Di tahun 2024, capaian persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebesar 100% yaitu telah dikembangkannya SIMPEG sehingga dapat sinkron dengan SI ASN BKN.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai SAKIP, persentase capaian perencanaan dan keuangan, serta persentase capaian layanan umum dan kepegawaian. Pada tahun 2024, BKD Kabupaten Pemalang mendapat nilai IKM sebesar 84,78 melebihi target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 83,95 sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,99%. Selanjutnya, nilai SAKIP sebesar 65,66 (kategori Baik). Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai IKM dan SAKIP adalah :

- a.Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM BKD Kabupaten Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b.Menjadikan hasil IKM dan SAKIP sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
- c.Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten Pemalang, BKPSDM Kabupaten Pemalang menerapkan sistem merit dan melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK, dengan capaian selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	NA	122,5	NA	238,5	262,5
2.	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	NA	NA	62,18	88,42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah



ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional.

Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN.

Selanjutnya capaian dalam pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM  
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Permasalahan
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93.602.000	91.252.500	97,49	-
2	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	325.678.400	283.882.840	87,17	-
3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	354.309.500	306.413.665	86,48	-
4	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	1.325.755.200	1.243.815.910	93,82	-

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, BKPSDM Kabupaten Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.8  
 Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan  
 Tupoksi BKPSDM Kabupaten Pemalang

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1)Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan	1)Kebijakan pengadaan pegawai ditentukan oleh Pemerintah Pusat	1)Adanya Aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dari BKN yang membantu penghitungan kebutuhan pegawai
	2)Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	2)Data kinerja dan potensi pegawai belum tersedia untuk semua pegawai	2)Adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN yang memfasilitasi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara)
	3)Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan	3)Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan	3)Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga
	4)Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan	4)Terbatasnya SDM dan sarpras untuk melaksanakan penilaian kompetensi ASN	4)Sudah terdapat UPT Penilaian Kompetensi yang dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri
	5)Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	5)Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya	5)Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN
	6)Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	6)Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN	6)Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN
	7)Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	7)Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	7)Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD
	8)Kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan	8)Adanya kebijakan yang dinamis	8)Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bapperida, BPKPAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDM Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1.**Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.  
Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.  
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.  
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.  
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5.Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

6.Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7.Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8.Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Organisatoris** yaitu **meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator sasaran **nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik**. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator kinerja **maturitas SPIP**.

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** maka tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, Pengawasan kualitas udara dan air;
  - b. Peningkatan pengelolaan sampah melalui implementasi metode 3R (reuse, reduce dan recycle), peningkatan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, penguatan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan sarana prasara pengelolaan sampah, serta penanganan limbah B3 (penyimpanan sementara);
  - c. Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan;
  - d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah;
  - e. Peningkatan institusi/perkantoran/sekolah bebas sampah;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang;
  - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
  - c. Pengurangan kesenjangan antar desa dan kecamatan;
  - d. Peningkatan konektivitas pemeliharaan dan rehab melalui Pembangunan, jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
  - e. Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
  - f. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai;
  - g. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan;
  - h. Peningkatan pelayanan dan penambahan pos pemadam kebakaran;
  - i. Penyediaan Early Warning System (EWS);
  - j. Pembentukan Desa tangguh Bencana (Destana);
  - k. Peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM;



3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, dengan fokus pada:
- a. Pencegahan radikalisme dan terorisme;
  - b. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
  - c. Mewujudkan kondusivitas dan kestabilan politik di masyarakat;
  - d. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan narkoba;
  - e. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. Implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak serta Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
  - g. Penguatan kelembagaan dan layanan UPTD PPPA dalam upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak;
  - h. Peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (ePemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca serta pengelolaan arsip;
  - i. Mendukung pembangunan kebudayaan;
  - j. Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, penyediaan fasilitas pendidikan bagi siswa; peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;
  - k. Peningkatan budaya literasi dan pendidikan budi pekerti;
  - l. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat melalui optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kasus balita gizi buruk dan stunting, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan (SDK);
  - m. Pengendalian pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan kualitas dan menekan jumlah penduduk serta Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR);
  - n. Peningkatan partisipasi dan kualitas serta daya saing pemuda dalam pembangunan dan olahraga;
  - o. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui Peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kualitas BLK;
  - p. Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat transmigrasi;
  - q. Mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui program jambanisasi, penanganan kawasan kumuh, penyediaan sumber air bersih dan sanitasi, penanganan RTLH;
  - r. Pengurangan beban hidup masyarakat melalui penanganan anak tidak sekolah, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, Optimalisasi layanan UHC, Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, pemberian jaminan dan perlindungan sosial;

- s. Pembinaan kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- 4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Manajemen Risiko;
  - b. Peningkatan Pelayanan, pembinaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan SDM pelayanan Pajak & Retribusi;
  - c. Peningkatan kualitas data daerah;
  - d. Peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien menuju desa mandiri.
  - e. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
  - f. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat;
  - g. Peningkatan pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui kajian;
  - h. Peningkatan indeks kapabilitas inovasi melalui pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
  - i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinovasi pada pengembangan potensi yang ada di lingkungannya;
  - j. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - k. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
- 5. Peningkatan produktivitas ekonomi, dengan fokus pada:
  - a. Pengembangan Pariwisata berbasis potensi lokal (Destinasi Wisata, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif);
  - b. Membuat paket wisata, event-event wisata dan Ekonomi Kreatif serta digitaslisasi promosi;
  - c. Peningkatan Kapasitas SDM pelaku usaha wisata dan ekraf;
  - d. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda;
  - e. Fasilitasi publikasi Promosi wisata dan Event lainnya melalui media publikasi Pemkab. Pemasang (online dan off line);
  - f. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri, dan Penguatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta peningkatan penggunaan produk dengan spesifikasi TKDN;
  - g. Peningkatan dan penguatan peran Koperasi dalam mendorong produktivitas pelaku usaha (IKM & UMKM);
  - h. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan;
  - i. Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner;
  - j. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian (Penyuluh, petani, petugas informasi harga, juru sembeli, veteriner, penyelenggaraan sekolah lapang pertanian dan lain-lain);
  - k. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi perikanan budidaya;

- l.Peningkatan hasil usaha produk olahan perikanan;
- m.Peningkatan peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor serta peningkatan perlindungan konsumen;
- n.Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal;
- o.Peningkatan fasilitasi digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM secara online;
- p.Pembinaan dan Pendampingan SDM Pelaku Usaha Pertanian;
- q.Pembinaan dan pendampingan SDM pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil usaha perikanan;
- r.Pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, peningkatan kawasan perdesaan dan Pengembangan Bumdes;
- s.Pembinaan dan pendampingan SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- t.Pembinaan dan Pendampingan UMKM (Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan dan Pemasaran) serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga;

BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung prioritas pembangunan peningkatan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, yaitu dengan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN sehingga ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah terbitnya peraturan baru terkait kepegawaian, diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang ke depan adalah:

- 1.Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten sehingga sinergitas dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2.Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti perangkat daerah kabupaten, BKD Provinsi, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian sehingga memperlancar kegiatan kepegawaian;
- 3.Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.



BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan kerja dengan lembaga profesi ASN, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, BKD Provinsi Jawa Tengah, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian/Lembaga. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1.Kebijakan pengadaan pegawai ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- 2.Data kinerja dan potensi pegawai belum tersedia untuk semua pegawai;
- 3.Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan;
- 4.Terbatasnya SDM dan sarpras untuk melaksanakan penilaian kompetensi ASN;
- 5.Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya;
- 6.Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN;
- 7.Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi;
- 8.Adanya kebijakan yang dinamis.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- 1.Adanya Aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dari BKN yang membantu penghitungan kebutuhan pegawai;
- 2.Adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN yang memfasilitasi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara);
- 3.Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga;
- 4.Sudah terdapat UPT Penilaian Kompetensi yang dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri;
- 5.Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN;
- 6.Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN;
- 7.Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD;
- 8.Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bapperida, BPKPAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi)

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, telaah visi, misi dan program unggulan Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang, yaitu pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	1.Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1.Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun	1.Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
			2.Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>real time</i> sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
			3.Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
			4.Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
		2.Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain	1.Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
			2.Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
			3.Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
			4.Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3.Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan <i>talent pool</i> dan rencana suksesi	1.Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
			2.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
			3.Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
			4.Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			5.Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
			6.Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN
			7.Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> , mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai
			8.Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
		4.Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan obyektif lainnya	1.Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
			2.Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi
		5.Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1.Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
			2.Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
			3.Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4.Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
			5.Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6.Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN	1.Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek obyektif lainnya
			2.Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
			3.Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan <i>data base</i> kepegawaian lainnya
		7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian
		8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan <i>e-performance/e-kinerja</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>
			3. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan <i>assessment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya profesionalitas ASN	1. Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS
			2. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2.Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

**2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.10  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				13.458.659.450	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.215.832.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.458.659.450	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.215.832.000	
5.03	KEPEGAWAIAN				10.859.715.750	KEPEGAWAIAN				9.740.832.000	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.551.730.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.492.832.000	
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	100 Persen		Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	100 Persen	7.417.784.000	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	100 Persen				Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	100 Persen	1.075.048.000	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 Dokumen	36.071.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	40 Dokumen	40.485.000	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	4.289.700	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.636.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.925.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	8.295.000	
5.03.01.2.01.0007						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	10.000.000	
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.908.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.900.300	
5.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	6.204.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>6.938.675.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>7.377.299.000</b>	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46/12 Orang/bulan	6.935.011.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.374.784.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.515.000	
<b>5.03.01.2.03</b>						<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>4.000.000</b>	
5.03.01.2.03.0001						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
5.03.01.2.03.0006						Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang tersedia</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>103.134.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>37.000.000</b>	
5.03.01.2.05.0002						Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>60 paket</b>	12.000.000	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	103.134.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25.000.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi umum yang tersedia</b>	<b>36 Paket</b>	<b>551.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</b>	<b>9 Kegiatan</b>	<b>370.568.000</b>	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
5.03.01.2.06.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	



Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	165.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	129.563.000	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.005.000	
5.03.01.2.06.0010						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
5.03.01.2.06.0011						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.000.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah yang dibeli</b>	<b>18 Unit</b>	<b>146.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>5 Unit</b>	<b>100.014.000</b>	
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	79.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.514.000	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	47.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.500.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>36 Paket</b>	<b>331.350.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>310.056.000</b>	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.960.000	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.096.000	
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>164 Unit</b>	<b>445.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>62 Unit</b>	<b>253.410.000</b>	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	123.410.000	
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pemalang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pemalang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.307.985.750	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.248.000.000	
	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		Persentase terpenuhinya ASN	74.43		Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		Persentase terpenuhinya ASN	74,43	355.000.000	
	Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	99.31		Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	99,31	220.000.000	
	Terpetakannya kompetensi ASN		Terpetakannya kompetensi ASN	19.19		Terpetakannya kompetensi ASN		Terpetakannya kompetensi ASN	21,16	175.950.000	
	Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	21.16		Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	19,19	85.800.000	
	Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	94.85		Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	94,85	207.800.000	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	90.15		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	90,15	203.450.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				840.084.200	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				503.450.000	
			Persentase layanan administrasi kepegawaian yang menggunakan sistem informasi	64 Persen				Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	3 Laporan	355.000.000	
			Persentase layanan administrasi pemberhentian tepat waktu	100 persen				Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	5980 Data	98.450.000	
			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 persen				Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	500 Dokumen	50.000.000	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	50.250.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	40.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	212.597.200	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	315.000.000	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	545 Dokumen	184.547.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 Dokumen	50.000.000	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0	-	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	185.740.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.000.000	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	196.950.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	23.450.000	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>592.240.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>270.000.000</b>	
			<b>Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan</b>	<b>14 Persen</b>				<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>	<b>180</b>	<b>220.000.000</b>	
			<b>Persentase layanan administrasi kenaikan pangkat</b>	<b>100 persen</b>				<b>Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu</b>	<b>1000</b>	<b>50.000.000</b>	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	125 Dokumen	189.230.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120	90.000.000	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	280.975.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	50.000.000	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 Dokumen	122.035.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60	130.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				329.266.850	Pengembangan Kompetensi ASN				261.750.000	
			Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	84,50 Persen	329.266.850			Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1094 Orang	60.000.000	
								Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80 Orang	115.950.000	
								Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	1292 Orang	85.800.000	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	120 Dokumen	132.971.850	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	120	85.800.000	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	46.697.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	60.000.000	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80 Orang	84.608.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80	75.000.000	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang	64.990.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5	40.950.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				546.394.700	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				212.800.000	
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	100 persen				Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	10.720 Orang	70.000.000	
			Persentase layanan administrasi izin perceraian	100 persen				Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	13 Orang	57.800.000	
			Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	100 persen				Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	12 Orang	80.000.000	
			Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	100 persen				Jumlah izin perceraian yang terbit	23 Dokumen	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	94.617.600	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	70.000.000	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	210.215.100	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	47.800.000	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10 Orang	43.798.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10	10.000.000	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang	85.123.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	50.000.000	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	85.623.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	30.000.000	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	27.018.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	23	5.000.000	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>2.598.943.700</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>475.000.000</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>2.598.943.700</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>475.000.000</b>	
	<b>Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan</b>		<b>Nilai IP ASN dimensi kompetensi</b>	<b>27,6</b>	<b>2.598.943.700</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan</b>		<b>Nilai IP ASN dimensi kompetensi</b>	<b>27,6</b>	<b>475.000.000</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>					<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>				<b>155.000.000</b>	
			<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>0,23 Persen</b>	<b>175.552.500</b>			<b>Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan</b>	<b>13 Orang</b>	<b>155.000.000</b>	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		51.990.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 dokumen	30.000.000	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	25 Orang	123.562.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	13 Orang	125.000.000	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>				<b>320.000.000</b>	
			<b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional</b>	<b>6,87 Persen</b>	<b>2.423.391.200</b>			<b>Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional</b>	<b>19 Orang</b>	<b>320.000.000</b>	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4 Dokumen	47.386.000	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	45.000.000	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	53 Laporan	2.330.737.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	19 Laporan	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	45.268.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	25.000.000	

Sumber : RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026



**2.5.Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat**

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.11  
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat  
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diupayakan pencapaiannya melalui Misi Asta Cita, meliputi :

1. Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan terutama pada sasaran utama “terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif melayani” melalui upaya mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN.

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", dengan prioritas pembangunan 2026 pada:

1. Ketahanan Pangan:  
Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan bendungan, serta optimasi lahan.
2. Ketahanan Energi:  
Penguatan ketahanan energi nasional.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG):  
Program prioritas unggulan dengan target menjangkau jutaan siswa, ibu hamil, dan balita untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting. Program ini juga bertujuan memberdayakan UMKM lokal.
4. Pendidikan Bermutu:  
Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas:  
Peningkatan kualitas kesehatan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di daerah.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM:  
Penguatan koperasi melalui program "Koperasi Merah Putih" dan pemberdayaan UMKM.
7. Pertahanan Semesta:  
Penguatan sistem pertahanan negara melalui modernisasi alutsista dan pengembangan industri dalam negeri.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global:  
Peningkatan investasi dan perdagangan internasional sebagai katalis pertumbuhan ekonomi

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-4 yaitu peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak terutama pada pencapaian peningkatan profesionalitas ASN.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN.

#### A. Tujuan

Tujuan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang akan dicapai di tahun 2026, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

#### B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas manajemen ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks NSPK Manajemen ASN** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) adalah panduan atau aturan yang mengarahkan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN untuk mencapai ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
2. **“Meningkatnya profesionalitas ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
3. **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan dan indikator **Nilai SAKIP OPD** yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang dalam hal ini adalah layanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta	Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan <i>database</i> manajemen talenta	Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN	Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta	Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran yang akan dicapai di tahun 2026 adalah **Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan yang berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
2. Penyusunan regulasi mengenai manajemen talenta;
3. Pembangunan sistem informasi manajemen talenta yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara;
4. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*;
5. Pemenuhan sumber daya manusia *assessment center*;
6. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian;
7. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
8. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit (Nilai)	Indeks	283,50
2		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Indeks)	%	88,92
3		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	%	78,32
4		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	85,18
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	%	72,41

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

**3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Pada tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 3 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp10.215.832.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang  
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>BKPSDM KABUPATEN PEMALANG</b>									
	Tujuan : Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai penerapan sistem merit	Nilai		283,5	10.215.832.000			294	14.734.881.409
5.03	<b>BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN</b>					9.740.832.000				14.634.881.409
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		85,18	1.075.048.000			85,38	1.938.000.000
		Nilai SAKIP OPD	Nilai		72,41	7.417.784.000			73,41	7.420.783.699
5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>					8.492.832.000				9.358.783.699
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen		100	7.417.784.000			100	7.420.783.699
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen		100	1.075.048.000			100	1.938.000.000
5.03.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi</b>	<b>Dokumen</b>		<b>40</b>	<b>40.485.000</b>			<b>40</b>	<b>43.249.699</b>
5.03.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Pemalang	2	4.289.700	DAU		2	4.500.000
5.03.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	6.000.000	DAU		2	6.000.000
5.03.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	6.000.000	DAU		2	6.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	Kab. Pemalang	19	8.295.000	DAU		19	9.000.000
5.03.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab. Pemalang	14	10.000.000	DAU		14	11.749.699
5.03.01.2.01.0010	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	Kab. Pemalang	1	5.900.300	DAU		1	6.000.000
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi</b>	<b>Laporan</b>		<b>2</b>	<b>7.377.299.000</b>			<b>2</b>	<b>7.377.534.000</b>
5.03.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kab. Pemalang	12	7.374.784.000	DAU		12	7.374.784.000
5.03.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	2	2.515.000	DAU		2	2.750.000
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi</b>	<b>Dokumen</b>		<b>3</b>	<b>4.000.000</b>			<b>3</b>	<b>4.000.000</b>
5.03.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	1	2.000.000	DAU		1	2.000.000
5.03.01.2.03.0006	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	2	2.000.000	DAU		2	2.000.000
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>2</b>	<b>37.000.000</b>			<b>2</b>	<b>37.000.000</b>
5.03.01.2.05.0002	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kab. Pemalang	60	12.000.000	DAU		60	12.000.000
5.03.01.2.05.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab. Pemalang	60	25.000.000	DAU		60	25.000.000
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>9</b>	<b>370.568.000</b>			<b>9</b>	<b>340.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	4	10.000.000	DAU		4	10.000.000
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	4	30.000.000	DAU		4	30.000.000
5.03.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	12	129.563.000	DAU		12	100.000.000
5.03.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	2	20.000.000	DAU		2	20.000.000
5.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Pemalang	12	20.000.000	DAU		12	20.000.000
5.03.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kab. Pemalang	4	5.000.000	DAU		4	5.000.000
5.03.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	12	151.005.000	DAU		12	150.000.000
5.03.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	3.000.000	DAU		2	3.000.000
5.03.01.2.06.0011	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	12	2.000.000	DAU		12	2.000.000
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>		<b>5</b>	<b>100.014.000</b>			<b>4</b>	<b>70.000.000</b>
5.03.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	1	39.514.000	DAU		0	-
5.03.01.2.07.0005	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	2	20.000.000	DAU		2	20.000.000
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	2	40.500.000	DAU		2	50.000.000
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Layanan</b>	<b>Kab. Pemalang</b>	<b>3</b>	<b>310.056.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3</b>	<b>322.000.000</b>
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Pemalang	12	2.000.000	DAU		12	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Pemalang	12	181.960.000	DAU		12	190.000.000
5.03.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Pemalang	12	126.096.000	DAU		12	130.000.000
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Unit</b>		<b>62</b>	<b>253.410.000</b>			<b>59</b>	<b>1.165.000.000</b>
5.03.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kab. Pemalang	36	123.410.000	DAU		37	95.000.000
5.03.01.2.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kab. Pemalang	10	30.000.000	DAU		10	30.000.000
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Pemalang	15	50.000.000	DAU		10	40.000.000
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Kab. Pemalang	1	50.000.000	DAU		2	1.000.000.000
	<b>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas manajemen ASN</b>	<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>Indeks</b>		<b>88,92</b>	<b>1.248.000.000</b>			<b>89,17</b>	<b>5.276.097.710</b>
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>1.248.000.000</b>				<b>5.276.097.710</b>
		<b>Persentase terpenuhinya ASN</b>	<b>Persen</b>		<b>74,43</b>	<b>355.000.000</b>			<b>77,39</b>	<b>1.501.400.000</b>
		<b>Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi</b>	<b>Persen</b>		<b>99,31</b>	<b>220.000.000</b>			<b>99,58</b>	<b>930.100.000</b>
		<b>Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi</b>	<b>Nilai</b>		<b>21,16</b>	<b>175.950.000</b>			<b>21,18</b>	<b>743.800.000</b>
		<b>Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya</b>	<b>Persen</b>		<b>19,19</b>	<b>85.800.000</b>			<b>20,69</b>	<b>362.497.710</b>
		<b>Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"</b>	<b>Persen</b>		<b>94,85</b>	<b>207.800.000</b>			<b>94,87</b>	<b>878.400.000</b>
		<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien</b>	<b>Persen</b>		<b>90,15</b>	<b>203.450.000</b>			<b>90,65</b>	<b>859.900.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
		Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Laporan		3	355.000.000			4	1.501.400.000
		Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	Data		5980	98.450.000			5930	449.900.000
		Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	Dokumen		500	50.000.000			500	180.000.000
5.03.02.2.01.0002	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	2	40.000.000	DAU		2	501.400.000
5.03.02.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Kab. Pemalang	1	315.000.000	DAU		2	1.000.000.000
5.03.02.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Kab. Pemalang	500	50.000.000	DAU		500	150.000.000
5.03.02.2.01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Kab. Pemalang	0	-	DAU		1	30.000.000
5.03.02.2.01.0010	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Kab. Pemalang	1	75.000.000	DAU		1	249.900.000
5.03.02.2.01.0011	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Kab. Pemalang	2	23.450.000	DAU		2	200.000.000
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN									
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen		180	220.000.000			180	930.100.000
		Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	Dokumen		1000	50.000.000			1000	200.000.000
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Kab. Pemalang	120	90.000.000	DAU		120	230.100.000
5.03.02.2.02.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	1000	50.000.000	DAU		1000	200.000.000
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	60	130.000.000	DAU		60	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN									
		Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang		1094	60.000.000			1104	200.000.000
		Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang		80	115.950.000			85	543.800.000
		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	Orang		1292	85.800.000			1412	362.497.710
5.03.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Kab. Pemalang	120	85.800.000	DAU		120	362.497.710
5.03.02.2.03.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Kab. Pemalang	100	60.000.000	DAU		100	200.000.000
5.03.02.2.03.0013	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	Kab. Pemalang	80	75.000.000	DAU		80	300.000.000
5.03.02.2.03.0014	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Kab. Pemalang	5	40.950.000	DAU		5	243.800.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
		Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	Orang		10720	70.000.000			10730	250.000.000
		Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang		13	57.800.000			13	300.000.000
		Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	Orang		12	80.000.000			12	328.400.000
		Jumlah izin perceraian yang terbit	Dokumen		23	5.000.000			23	30.000.000
5.03.02.2.04.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Kab. Pemalang	4	70.000.000	DAU		4	250.000.000
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Kab. Pemalang	3	47.800.000	DAU		3	250.000.000
5.03.02.2.04.0005	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	Kab. Pemalang	10	10.000.000	DAU		10	50.000.000
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Kab. Pemalang	120	50.000.000	DAU		120	228.400.000
5.03.02.2.04.0008	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Kab. Pemalang	12	30.000.000	DAU		12	100.000.000
5.03.02.2.04.0009	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Kab. Pemalang	23	5.000.000	DAU		23	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		78,32	475.000.000			78,34	100.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					475.000.000				100.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai		27,6	475.000.000			27,8	100.000.000
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultura	Orang		13	155.000.000			2	25.000.000
5.04.02.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	Kab. Pemalang	1	30.000.000	DAU		1	10.000.000
5.04.02.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Kab. Pemalang	13	125.000.000	DAU		2	15.000.000
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional	Orang		19	320.000.000			2	75.000.000
5.04.02.2.02.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Kab. Pemalang	2	45.000.000	DAU		2	10.000.000
5.04.02.2.02.0007	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Kab. Pemalang	19	250.000.000	DAU		2	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.02.2.02.0008	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Kab. Pemalang	1	25.000.000	DAU		1	15.000.000

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029



**3.4. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang**

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan, sasaran dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4  
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis dan Operasional  
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Adanya unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	8	Pengisian jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan PPK	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kepala BKPSDM	setiap ada pengisian jabatan
2	Aspek pemenuhan NSPK tidak dapat dinilai	8	Penilaian NSPK berdasar data real time tahun yang dinilai	Target kinerja indeks NSPK manajemen ASN tidak tercapai	Leadership yang kuat dalam memberikan penekanan dan penguatan pada seluruh pengampu kegiatan untuk mengoptimalkan implementasi NSPK	Kepala BKPSDM	31 Desember setiap tahun berjalan
3	Penilaian kinerja tidak obyektif	12	Ketidaktegasan pimpinan untuk menilai secara obyektif	Demotivasi pegawai	- Penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BKPSDM	TW I Tahun 2026
					- Penyusunan rancangan kebijakan terkait pengelolaan kinerja	Kepala BKPSDM	TW II Tahun 2026
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						
1	Mark Up anggaran penyediaan komponen listrik	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
2	Mark Up anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
3	Mark Up anggaran oenyediaan bahan logistik kantor	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
4	Mark Up anggaran penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
5	Mark Up anggaran penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
6	Mark Up anggaran pengadaan kendaraan dinas	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Mark Up anggaran pengadaan mebel	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
8	Mark Up anggaran pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
9	Intervensi kepentingan non-teknis	8	Tekanan politik/birokrasi dalam menentukan formasi	Formasi tidak objektif, tidak sesuai kebutuhan organisasi, menurunkan kredibilitas instansi	Digitalisasi proses (paperless, jejak audit elektronik) untuk menutup celah intervensi manual.	Kabid PPIK	Setiap ada pengadaan CASN
10	Gangguan teknis sistem (server down, error, atau lambat)	8	Infrastruktur TI terbatas, kurang pemeliharaan sistem, beban akses tinggi	Akses informasi terganggu, pelayanan administrasi ASN terhambat	Melakukan pelatihan teknis dan simulasi insiden untuk tim IT secara rutin dengan melibatkan Diksominfo	Kabid PPIK	Jika ada pelatihan dari Diskominfo
11	Keamanan data kepegawaian terancam (kebocoran/hack)	8	Sistem keamanan lemah, password sharing, tidak ada proteksi berlapis	Data pribadi ASN bocor, menurunkan kepercayaan, berpotensi masalah hukum	Akan dilakukan monitoring secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan hak akses pada aplikasi	Kabid PPIK	Setiap Semester
12	Adanya intervensi dari pihak lain dalam proses mutasi	12	Benturan Kepentingan dari luar	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kabid MP	Setiap ada mutasi / rotasi PNS
13	Adanya intervensi dari pihak lain dalam proses promosi	8	Benturan Kepentingan dari luar	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kabid MP	Setiap ada promosi PNS
14	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya terbatas	8	Jumlah asesor yang tidak memadai	Data kompetensi ASN tidak tersedia lengkap	- Melakukan coaching clinic internal untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana penkom - Melakukan uji coba aplikasi penilaian kompetensi	Ka UPT	Tahun 2026
15	Pengangkatan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	9	Adanya regulasi baru tentang Jabatan Fungsional	Karir Pejabat Fungsional tidak dapat berkembang, karena tidak bisa naik jenjang JF	- Memfasilitasi pengusulan formasi kebutuhan JF ke instansi Pembina - Menerima konsultasi permasalahan JF - Memberikan informasi terkait uji kompetensi JF	Kabid PSDM	Tahun 2026
16	Pelaporan kinerja tidak tepat waktu	8	Pegawai ASN melakukan pelaporan kinerja di akhir periode penilaian	Pemotongan TPP	- Sosialisasi kinerja	Kabid PEKA	Triwulan I, II, III, IV 2026

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
17	Intervensi dari pimpinan terhadap pengusulan pegawai ASN Berprestasi	8	Pengusulan pegawai ASN berprestasi oleh unit kerja karena faktor kedekatan dengan pimpinan	Penetapan pegawai ASN Berprestasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan	- Penyusunan SOP - Sosialisasi tata cara pengusulan ASN Berprestasi	Kabid PEKA	Triwulan II 2026
18	Pembiaran dan pengabaian pelanggaran disiplin	12	Kurangnya pemahaman tentang disiplin ASN, kurangnya kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaan ketentuan disiplin ASN	Tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran disiplin ASN	- Sosialisasi terkait regulasi Disiplin ASN - Pemberian sanksi yang tegas terhadap atasan langsung yang tidak melakukan penegakkan disiplin ASN	Kabid PEKA	Tahun 2026
19	Gugatan atas terbitnya penjatuhan hukuman disiplin	8	Ketidakpuasan atas hukuman disiplin, adanya ketentuan upaya hukum terhadap penjatuhan hukuman disiplin,	Keputusan hukuman disiplin bisa dianulir	- Pencarian informasi yang komprehensif terhadap obyek dan dokumen pemeriksaan sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin - Permohonan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin melalui i-mut	Kabid PEKA	Kasuistis
20	Tidak semua pegawai masuk dalam dokumen HCDP	8	Tidak ada usulan dari Perangkat Daerah	Tingginya GAP Kompetensi	membuat dashboard monitoring pengembangan SDM	Kabid PSDM	Triwulan I 2026
21	Minimnya minat diklat pegawai di lingkungan kabupaten pemalang	12	Kurangnya motivasi ASN terhadap peningkatan kapasitas diri	Target pengembangan kompetensi ASN tidak tercapai	melakukan sosialisasi pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN melalui surat edaran, forum internal, dan media komunikasi OPD.	Kabid PSDM	Semester 1 2026
22	Tidak terselenggaranya diklat di lingkungan kabupaten pemalang	8	Tidak adanya perencanaan kegiatan diklat dalam RKPD atau Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	ASN tidak memperoleh peningkatan kompetensi sesuai tuntutan jabatan	Menyusun jadwal koordinasi rutin dengan lembaga penyelenggara diklat (LAN, BKPSDM, atau lembaga pelatihan lainnya).	Kabid PSDM	Triwulan

*Sumber : Manajemen Risiko Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029*

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi sebesar 100 persen dan persentase layanan umum dan pepegawaian yang terpenuhi sebesar 100 persen, program ini dilakukan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi sebanyak 40 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 19 laporan
  - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 14 laporan
  - f. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan sebanyak 1 berita acara
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi sebanyak 2 laporan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 47 orang selama 12 bulan
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi sebanyak 3 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 kegiatan
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi sebanyak 2 kegiatan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 60 paket

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan peserta 60 orang
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah fasilitasi administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 paket
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 paket
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 dokumen
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 4 kegiatan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
  - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 2 dokumen
  - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 12 dokumen
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sebanyak 5 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit
  - b. Pengadaan Mebel sebanyak 2 unit
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah ketersediaan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 3 layanan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sebanyak 62 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 36 unit
  - b. Pemeliharaan Mebel sebanyak 10 unit
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 15 unit
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit
- B. Program Kepegawaian Daerah dengan target capaian persentase terpenuhinya ASN sebesar 74,43 persen; persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi sebesar 99,31 persen; nilai IP ASN dimensi kualifikasi sebesar 21,16; persentase ASN yang terpetakan kompetensinya sebesar 19,19 persen; persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik" sebesar 94,85 persen; dan

persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien sebesar 90,15 persen. Program ini dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target capaian jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN sebanyak 3 laporan, jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN sebanyak 5980 data dan jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu sebanyak 500 dokumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebanyak 2 dokumen
  - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 1 kegiatan
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 500 dokumen
  - d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 kegiatan
  - e. Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target capaian jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 180 dokumen dan jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu sebanyak 1000 dokumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pengelolaan Mutasi ASN sebanyak 120 dokumen
  - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1000 dokumen
  - c. Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 60 dokumen
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan target capaian jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.094 orang, jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 80 orang dan jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya sebanyak 1.292 orang. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pengelolaan Assessment Center sebanyak 120 dokumen
  - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebanyak 100 orang
  - c. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sebanyak 80 orang
  - d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebanyak 5 orang
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target capaian jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN sebanyak 10.720 orang, jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa sebanyak 13 orang, jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin sebanyak 12 orang dan jumlah izin perceraian yang terbit sebanyak 23 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 4 kegiatan
  - b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebanyak 3 orang
  - c. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai sebanyak 10 orang
  - d. Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 120 orang
  - e. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 12 orang
  - f. Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai sebanyak 23 orang



- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target capaian Nilai IP ASN dimensi kompetensi sebesar 27,6. Program ini dilakukan melalui kegiatan:
1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target capaian jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural sebanyak 13 orang, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebanyak 1 dokumen.
    - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum untuk 13 orang.
  2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target capaian jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional sebanyak 19 orang, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga sebanyak 2 kegiatan.
    - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan untuk 19 orang.
    - c. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebanyak 1 kegiatan.

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG									
	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN			Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	283,5	10.215.832.000	294	14.734.881.409	
5.03	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN									
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,18	1.075.048.000	85,38	1.938.000.000	
				Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,41	7.417.784.000	73,41	7.420.783.699	
5.03.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen	100	7.417.784.000	100	7.420.783.699	
				Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	1.075.048.000	100	1.938.000.000	
5.03.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokumen	40	40.485.000	40	43.249.699	
5.03.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.289.700	2	4.500.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	19	8.295.000	19	9.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	10.000.000	14	11.749.699	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.01.0010			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	1	5.900.300	1	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan	2	7.377.299.000	2	7.377.534.000	
5.03.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.515.000	2	2.750.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Dokumen	3	4.000.000	3	4.000.000	
5.03.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan	2	37.000.000	2	37.000.000	
5.03.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	12.000.000	60	12.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	25.000.000	60	25.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan	9	370.568.000	9	340.000.000	
5.03.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	129.563.000	12	100.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	151.005.000	12	150.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	5	100.014.000	4	70.000.000	
5.03.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	39.514.000	0	-	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.500.000	2	50.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	310.056.000	3	322.000.000	
5.03.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	181.960.000	12	190.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	126.096.000	12	130.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	62	253.410.000	59	1.165.000.000	
5.03.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	123.410.000	37	95.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	30.000.000	10	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	50.000.000	10	40.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.000.000	2	1.000.000.000	Kab. Pemalang
		Meningkatkan kualitas manajemen ASN		Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	88,92	1.248.000.000	89,17	5.276.097.710	
5.03.02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.248.000.000		5.276.097.710	
				Persentase terpenuhinya ASN	Persen	74,43	355.000.000	77,39	1.501.400.000	
				Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	99,31	220.000.000	99,58	930.100.000	
				Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	21,16	175.950.000	21,18	743.800.000	
				Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	19,19	85.800.000	20,69	362.497.710	
				Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	94,85	207.800.000	94,87	878.400.000	
				Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	90,15	203.450.000	90,65	859.900.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
				Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Laporan	3	355.000.000	4	1.501.400.000	
				Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	Data	5980	98.450.000	5930	449.900.000	
				Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	Dokumen	500	50.000.000	500	180.000.000	
5.03.02.2.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	40.000.000	2	501.400.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	315.000.000	2	1.000.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500	50.000.000	500	150.000.000	
5.03.02.2.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	1	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75.000.000	1	249.900.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	23.450.000	2	200.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.02			Mutasi dan Promosi ASN							
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen	180	220.000.000	180	930.100.000	
				Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	Dokumen	1000	50.000.000	1000	200.000.000	
5.03.02.2.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	120	90.000.000	120	230.100.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000	50.000.000	1000	200.000.000	Kab. Pemalang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.02.0003			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	60	130.000.000	60	700.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03			Pengembangan Kompetensi ASN							
				Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1094	60.000.000	1104	200.000.000	
				Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	80	115.950.000	85	543.800.000	
				Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	Orang	1292	85.800.000	1412	362.497.710	
5.03.02.2.03.0002			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	120	85.800.000	120	362.497.710	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	100	60.000.000	100	200.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	80	75.000.000	80	300.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	5	40.950.000	5	243.800.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
				Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	Orang	10720	70.000.000	10730	250.000.000	
				Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang	13	57.800.000	13	300.000.000	
				Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	Orang	12	80.000.000	12	328.400.000	
				Jumlah izin perceraian yang terbit	Dokumen	23	5.000.000	23	30.000.000	
5.03.02.2.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	70.000.000	4	250.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	3	47.800.000	3	250.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	10	10.000.000	10	50.000.000	Kab. Pemalang



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	120	50.000.000	120	228.400.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	30.000.000	12	100.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0009			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	23	5.000.000	23	30.000.000	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,32	475.000.000	78,34	100.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	27,6	475.000.000	27,8	100.000.000	
5.04.02.2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural	Orang	13	155.000.000	2	25.000.000	
5.04.02.2.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	30.000.000	1	10.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	13	125.000.000	2	15.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional	Orang	19	320.000.000	2	75.000.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.02.2.02.0005			Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	2	45.000.000	2	10.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	19	250.000.000	2	50.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1	25.000.000	1	15.000.000	Kab. Pemalang

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2026		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	60	25.000.000	ASN BKD Kabupaten Pemalang
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>					
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	13	125.000.000	ASN Kabupaten Pemalang
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	19	250.000.000	ASN Kabupaten Pemalang

Sumber : RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja tahun 2026 ini adalah :

1. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026.
2. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang, UPT dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2026.

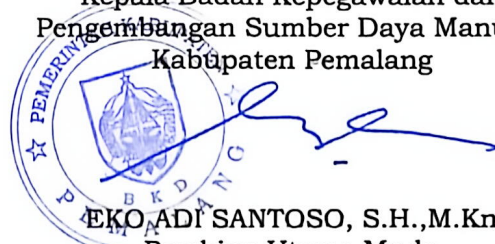
#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026.

Pemalang, 15 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pemalang

  
**EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 188.4 /05/ TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,  
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;



13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pematang serta menyusun arah kebijakan dan strategi program BKD Kabupaten Pematang yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. Menghimpun dan menganalisis dokumen, data dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025;
- c. Menerjemahkan target tahunan Renstra BKD Kabupaten Pematang ke dalam Renja tahun 2026;
- d. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun dokumen Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan pengendalian kebijakan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  
Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 188.4/ 05 /TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029, RENCANA  
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,  
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Pengarah	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003





BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025-2045;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
- d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

- e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN  
2025-2029, RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana



2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana



13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana



15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana



19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

### 31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

### 32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

### 33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

### 37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

### 38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

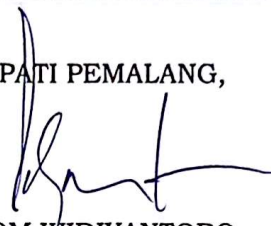
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52312  
Telepon (0284) 321376 Fax (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 2 Juni 2025

Nomor : B/100/81/BKD/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah  
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029  
dan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Yth. Terlampir

di  
Pemalang

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

Acara : Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana  
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan  
Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Catatan : 1. Hadir tepat waktu

2. Kepala OPD untuk Menugaskan Kasubbag Umum dan  
Kepegawaian

Demikian atas kehadirannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680908 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

**LAMPIRAN I**

Nomor : B/100/81/BKD/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah  
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum  
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Inspektur Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
15. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
26. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
28. Camat Moga;
29. Camat Pulosari;
30. Camat Belik;
31. Camat Watukumpul;
32. Camat Bodeh;
33. Camat Bantarbolang;
34. Camat Randudongkal;
35. Camat Pemalang;
36. Camat Taman;
37. Camat Petarukan;
38. Camat Ampelgading;
39. Camat Comal;
40. Camat Ulujami;
41. Camat Warungpring;
42. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
43. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia;
44. Pimpinan Institut Agama Islam Pemalang;
45. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Adias Pemalang.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

**LAMPIRAN II**

Nomor : B/100/81/BKD/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah  
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum  
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Susunan Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana  
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum Konsultasi Publik  
Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Waktu	Acara	Keterangan
08.30-09.00	Pembukaan	Panitia
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
	- Pembacaan Doa	
09.00-09.20	Sambutan dan Pembukaan Acara	Kepala BKD Kab. Pemalang
09.20-09.30	Persiapan Paparan	Moderator
09.30-10.00	Paparan "Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung oleh BKD Kabupaten Pemalang".	Kepala Bappeda Kab. Pemalang
10.00-10.30	Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	Kepala BKD Kab. Pemalang
10.30-11.00	Materi Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang	Kabid, Kepala UPT Penkom
11.00-11.30	Diskusi	Moderator
11.30-11.45	Penandatanganan Berita Acara	Perwakilan Peserta
11.45-12.00	Penutup	Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang 52312  
Telp. (0284) 321376 – Fax. (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>



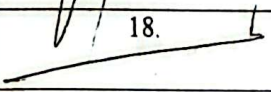








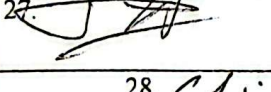










Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 – selesai

Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang





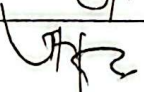


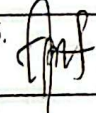

Acara : Forum Perangkat Desa / Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis  
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Forum Konsultasi  
Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025.

NAMA	JABATAN	OPD/ INSTANSI	TANDA TANGAN
Sony S.	Kasubag anpeg	Warungpring	1.
Ika Listiyarini P	Umpeg staff	Diskaperindag	2.
Trimo Hermanto	staf	DISTHUP	3.
TEGM P	PA. BELANG	UMPEG	4.
Ade D-Farachudin	Kasubag umpeg	Dukcapil	5.
CRIP	Umpeg	Diswadp	6.
Karyoto	Staf Umpeg	Randusongkal	7.
Chaim Taufik	Kec. BELU Umpeg	BELU	8.
Rsa Juliane	staf	Disperlim	9.
Kili Lestari	—	—	10.
Castrena Ayu	Umpeg	Disparpora	11.
Musofin	staf	Bag. Umum	12.
Ghifary Azmiy w.	staf	Bag. Umum	13.
Hur Inzal	staf	Kec. Pml	14.
Novita Umi H	staf	Kec. Samal	15.

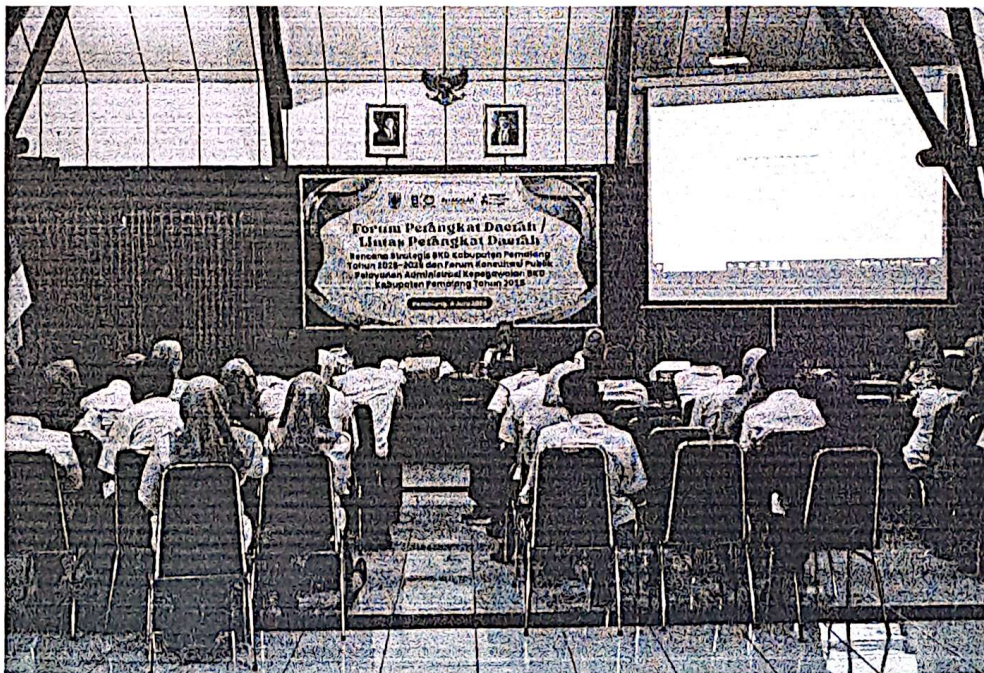
Sri Maitingsi	Umpeg	Aspeni	16. 
Ponco Widora			17. 
Catr			18. 
ABDUL JALIL	DINDIKBUD		19. 
Ismi Puji Wiyanti	Dindikbud		20. 
WIBOWO	Satpol PP		21. 
SUKARTO	-		22. 
Supri Lani	Ampraman		23. 
Rieki	Bas. Org.		24. 
Supargion	Umpeg	Moga.	25. 
M. Unteng	Dpu To		26. 
Rinto	Ka Angkel	Umpeg	27. 
Suwandi	Starumpes	Pulosari	28. 
SRI VERNATI	Kano	BKO	29. 
P. Yuhadun	Setuanti	Shu	30. 
HERRA WIDOWO	WSPKORAT		31. 
Fajar Legoro	Setuanti		32. 
PEHI. H	BPKAD	UMPEG	33. 
Dian Ayu	Umpeg	Bayenda	34. 
Ali Basore	PWT		35. 
Nanang Komar	DCH	DeH	36. 
Endas		BKO	37. 



Riri .s	Pelaksana	BKD	38.
Sri Haryanti	"	BKD	39.
Marhaeny WH	"	BKD	40.
Dutpani	Umpeg	BPBD	41.
Pertama	Saj	BPBD	42.
Rolihon	Staf	BKD	43.
Tu Setiawan			44.
Dini	Upemman	BKD	45.
Mauli Rumiati	Umpeg	Disturb.	46.
<del>Van Anas</del>	<del>Umpeg</del>	<del>Ura. Canteen</del>	47.
Nurhijah		BPD	48.
Malik L	Umpg	BKD	49.
M Tardun	Umpeg	Dokter	50.
Nursetan	"	Dokter	51.
Artaman	Analisis BMDA	BKD	52.
Eko Rini A.P	Analis Gempa	BKD	53.
Tri Handayani	ITB Adari		54.
Saryanti	Kec	Tanah	55.
Arina Alimudin	Insip Pm1		56.
Dianita Apitani	ABDMA	BKD	57.
Eko Hada P	Umpeg	Pec Ulayani	58.
Susi Afriyanti	Pengad Umpeg	Dokter	59.

0.	Correna R. A	Umpeg	Dinkes	60. 
1.	Fatkhurrohman		Dinas	61. 
2.	Widayati	Umpeg	Disnominf	62. 
3.	Lisliyan	Limpes	Dispolu	63. 
4.	Anni Risky Amelia	DKABKD	BKD	64. 
5.	Dimas Widyono	Bangker	BKD	65. 
6.	Dianita Apriani	Muspro	BKD	66. 
7.	Niffiani Ann D S -	Umpeg	BKD	67. 
8.				68.
9.				69.
0.				70.







**BERITA ACARA**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH**  
**RENCANA STRATEGIS BKD KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2025-2029**

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula BKD Kabupaten Pemalang, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan dan presentasi-presentasi yang disampaikan oleh :
  - a. Kepala BKD Kabupaten Pemalang
  - b. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung Oleh BKD Kabupaten Pemalang
  - c. Kepala BKD Kabupaten Pemalang : Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka pada:  
Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025  
J a m : 11.30 WIB  
Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

**MENYEPAKATI**


- KESATU : Tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disertai indikator, target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rumusan saran masukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 4 Juni 2025






Plt. Sekretaris  
BKD Kabupaten Pemalang  
selaku

Pimpinan Sidang

  
Fx. Sunaryanta



Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana  
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	Nama	Lembaga/instansi	Tanda Tangan
1.	RIEKI SIH SUCI	Bag. Organisasi	
2.	SONY SOFYAN, S.H	Kec. Warungpring	
3.	PENI HERMIYATI	BPKAD	
4.	ALI BASARAH	PWI Kab. Pemalang	
5.	Dr. TRI HANDAYANI, S.E., M.Si	ITB ADIAS	


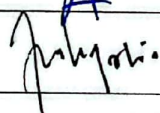
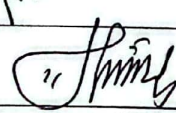
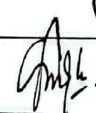
**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUN 2026**  
**PERANGKAT DAERAH RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN MANUSIA**

---

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  
Tanggal : 1 September 2025

Hasil verifikasi rencana kerja tahun 2026 Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, terdiri dari:  
Bab I : Pendahuluan  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Bab V : Penutup
2. Mohon berpedoman pada Surat Edaran Nomor 000.7/2218/Bappeda/2025 tentang Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 serta Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026"
3. Bab I  
- Sudah sesuai.
4. Bab II  
Sudah sesuai.
5. Bab III  
- Pada sub bab "3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional", kaitkan dengan astacita;
6. Bab IV  
- Sudah sesuai.
7. Bab V  
- Sudah sesuai.
8. Lampiran  
- Sudah sesuai.

VERIFIKATOR	
1. Rizki Novitasari, S.I.Kom,MM	
2. Nurhayati, S.E.	
3. Cicik Nureliyanti, S.Stat	
4. Handini Kartikasami, S.Pd.	

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan agenda kerja	v			
2	Pengolahan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat		v	Tidak ada usulan dari masyarakat	
9	Perumusan kegiatan prioritas	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
10a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiaran hasil Musrenbang kecamatan		v	Tidak ada usulan hasil Musrenbang Kecamatan	
10b	Mempertajam indicator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
10c	Mensikronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya	v			
10d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	v			

Pemalang, 16 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680908 199803 1 003